



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

Jalan Trans Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang
BENGKAYANG 79212

DPMPTSP@GMAIL.COM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penetapannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang pada awalnya berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, namun pada pelaksanaannya ternyata kurang efektif dan tidak efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diperlukan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renja merupakan langkah awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2025, dan sebagai acuan dalam pelaksanaan program ditahun tersebut. Rencana Kerja sangat penting bagi upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) pada dasarnya adalah indicator sasaran (Outcome) dan pada setiap kegiatan akan mendukung pencapaian sasaran atau indicator hasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, dibuat dan disusun sebagai pedoman kerja yang lebih terukur, terfokus, transparan dan akuntabel dalam penerapannya di Tahun 2025, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terima kasih.

Bengkayang, Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG



PAULUS, SH., M.Kn

Pembina Tk.I

NIP. 19740718 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
BAB I : PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PD	26
3.1. Tujuan dan sasaran	27
3.2. Program dan Kegiatan	29
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	32
BAB V : PENUTUP	
4.1. Catatan Penting	33
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	33
4.3. Rencana Tindak Lanjut	34
LAMPIRAN I	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja PD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025. Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Bengkayang tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang tahun 2025 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
- g. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- i. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- j. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20198 (Covid-19) dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- l. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- o. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- s. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan di Bidang Penanaman Modal;

- t. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509);
- u. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik;
- v. Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- w. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- y. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
- z. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 45); dan
- aa. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan harapan dapat mencapai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
2. Mengupayakan program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang penyusunan Rencana Kerja PD, Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja PD, pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja PD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Program diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi secara terukur, sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strategisnya. Maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dalam kurun waktu satu tahun

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Bengkayang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Bengkayang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkayang selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang setelah perubahan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.

4.599.870.751. Keseluruhan anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

**ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

<i>BELANJA</i>		<i>Rp. 4.599.870.751</i>
<i>A</i>	<i>BELANJA OPERASIONAL</i>	<i>RP. 4.465.023.751</i>
	<i>Belanja pegawai</i>	<i>RP. 2.682.581.999</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>RP. 1.782.441.752</i>
<i>B</i>	<i>BELANJA MODAL</i>	<i>RP. 134.847.000</i>
	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	<i>RP. 74.847.000</i>
	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>Rp. 60.000.00</i>
	<i>JUMLAH</i>	<i>RP. 4.599.870.751</i>
	<i>Surplus/(Defisit)</i>	<i>(Rp3.743.870.751)</i>

Anggaran Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Bengkayang Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.599.870.751,- dengan 6 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.4.181.578.744,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90.91%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023				
URUSAN PEMERINTAH : 2.18 PENANAMAN MODAL				
UNIT ORGANISASI : 2.18.0-00.0-00.01.001 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
SUB UNIT ORGANISASI : 2.18.0-00.0-00.01.001.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	4.599.870.751,00	4.181.578.744,00	90,91
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.788.514.551,00	3.544.557.809,00	93,56
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.820.500,00	22.020.700,00	59,8
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.387.000,00	12.073.700,00	69,44
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.387.000,00	12.073.700,00	69,44
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.387.000,00	12.073.700,00	69,44
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.363.500,00	0	0
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.363.500,00	0	0
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.363.500,00	0	0
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	2.387.500,00	2.302.500,00	96,44
01.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.387.500,00	2.302.500,00	96,44
01.2.01.01.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.387.500,00	2.302.500,00	96,44
01.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.636.000,00	9.771.200,00	77,33
01.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.636.000,00	9.771.200,00	77,33
01.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.636.000,00	9.771.200,00	77,33
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.421.000,00	4.101.500,00	92,77
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.421.000,00	4.101.500,00	92,77
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	4.101.500,00	92,77
01.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	2.384.000,00	89,17
01.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	2.384.000,00	89,17
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	544.000,00	70,33
01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.840.000,00	96,84
01.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.02.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.749.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.749.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.749.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	2.000,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.747.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	0	0
01.2.01.03.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	0	0
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.421.000,00	1.717.500,00	38,85
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.421.000,00	1.717.500,00	38,85
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	1.717.500,00	38,85
01.2.01.04.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	0	0
01.2.01.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	0	0

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	0	0
01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	0	0
01.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.04.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	1.717.500,00	98,28
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	224.000,00	28,96
01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.840.000,00	96,84
01.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.747.500,00	0	0
01.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	0	0
01.2.01.05.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	0	0
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.000,00	2.064.000,00	46,69
01.2.01.06.5.1.02.01	Belanja Barang	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.673.500,00	2.064.000,00	77,2
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	773.500,00	224.000,00	28,96
01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.840.000,00	96,84
01.2.01.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.747.500,00	0	0
01.2.01.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.747.500,00	0	0
01.2.01.06.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.747.500,00	0	0
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.829.077.031,00	2.778.396.092,00	98,2
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.532.941.999,00	2.510.680.132,00	99,12
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.532.941.999,00	2.510.680.132,00	99,12
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.532.941.999,00	2.510.680.132,00	99,12
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.645.712.185,00	1.644.280.236,00	99,91
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.174.984.920,00	1.173.608.520,00	99,88
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.174.984.920,00	1.173.608.520,00	99,88
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	106.771.386,00	106.771.386,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	106.771.386,00	106.771.386,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.190.000,00	155.190.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.190.000,00	155.190.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.090.000,00	27.090.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.090.000,00	27.090.000,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	69.885.300,00	69.885.300,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	69.885.300,00	69.885.300,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.237.360,00	4.197.360,00	99,06
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.237.360,00	4.197.360,00	99,06
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.537,00	14.300,00	77,14
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.537,00	14.300,00	77,14
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	97.873.798,00	97.873.798,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	97.873.798,00	97.873.798,00	100
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.419.685,00	2.412.377,00	99,7
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.419.685,00	2.412.377,00	99,7
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.241.199,00	7.237.195,00	99,94
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.241.199,00	7.237.195,00	99,94
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	887.229.714,00	866.399.896,00	97,65
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	865.479.078,00	844.649.260,00	97,59
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	865.479.078,00	844.649.260,00	97,59
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.750.636,00	21.750.636,00	100
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	21.750.636,00	21.750.636,00	100
01.2.02.01.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100	0	0

01.2.02.01.5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100	0	0
01.2.02.01.5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	100	0	0
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	261.448.032,00	246.180.360,00	94,16
01.2.02.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	235.200.000,00	231.600.000,00	98,47
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.600.000,00	115.200.000,00	97,96
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	49.200.000,00	49.200.000,00	100
01.2.02.02.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	68.400.000,00	67.200.000,00	98,25
01.2.02.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.248.032,00	14.580.360,00	55,55
01.2.02.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.379.936,00	13.284.360,00	76,44
01.2.02.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.434.048,00	576.000,00	12,99
01.2.02.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.434.048,00	720.000,00	16,24
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.956.000,00	6.853.000,00	86,14
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.956.000,00	6.853.000,00	86,14
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.956.000,00	6.853.000,00	86,14
01.2.02.04.5.1.02.01	Belanja Barang	4.822.000,00	3.790.000,00	78,6
01.2.02.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.822.000,00	3.790.000,00	78,6
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.972.000,00	1.030.000,00	52,23
01.2.02.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	2.760.000,00	96,84
01.2.02.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.134.000,00	3.063.000,00	97,73
01.2.02.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.134.000,00	3.063.000,00	97,73
01.2.02.04.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.134.000,00	3.063.000,00	97,73
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.670.000,00	7.752.500,00	89,42
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	8.670.000,00	7.752.500,00	89,42
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	7.752.500,00	89,42
01.2.02.05.5.1.02.01	Belanja Barang	5.250.500,00	4.648.000,00	88,52
01.2.02.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.250.500,00	4.648.000,00	88,52
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.688.000,00	1.198.000,00	70,97
01.2.02.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.562.500,00	3.450.000,00	96,84
01.2.02.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.419.500,00	3.104.500,00	90,79
01.2.02.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.419.500,00	3.104.500,00	90,79
01.2.02.05.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.419.500,00	3.104.500,00	90,79
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	18.061.000,00	6.930.100,00	38,37
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.061.000,00	6.930.100,00	38,37
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.061.000,00	6.930.100,00	38,37
01.2.02.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.407.000,00	829.100,00	58,93
01.2.02.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.407.000,00	829.100,00	58,93
01.2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.407.000,00	829.100,00	58,93
01.2.02.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.170.000,00	6.101.000,00	98,88
01.2.02.07.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.170.000,00	6.101.000,00	98,88
01.2.02.07.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.170.000,00	6.101.000,00	98,88
01.2.02.07.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.484.000,00	0	0
01.2.02.07.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.484.000,00	0	0
01.2.02.07.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.484.000,00	0	0
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.894.000,00	1.221.400,00	6,14
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.178.700,00	259.957.786,00	87,18

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02.01	Belanja Barang	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.169.100,00	15.837.800,00	97,95
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02.01	Belanja Barang	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.375.800,00	52.921.900,00	97,33
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.600.000,00	63.414.000,00	96,67
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	65.600.000,00	63.414.000,00	96,67
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	63.414.000,00	96,67
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	60.000.000,00	57.814.000,00	96,36
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	57.814.000,00	96,36
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.550.000,00	51.874.000,00	96,87
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.450.000,00	5.940.000,00	92,09
01.2.06.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	100
01.2.06.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.600.000,00	100
01.2.06.04.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.600.000,00	5.600.000,00	100
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.002.800,00	47.679.700,00	86,69
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.032.800,00	45.603.700,00	87,64
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.970.000,00	2.076.000,00	69,9
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000,00	7.350.000,00	44,55
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	7.350.000,00	44,55
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	7.350.000,00	44,55
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Barang	13.320.000,00	7.350.000,00	55,18
01.2.06.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.320.000,00	7.350.000,00	55,18
01.2.06.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.320.000,00	7.350.000,00	55,18
01.2.06.06.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.180.000,00	0	0
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.180.000,00	0	0
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.180.000,00	0	0
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.531.000,00	72.754.386,00	80,36
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.847.000,00	131.400.000,00	93,96
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.847.000,00	131.400.000,00	93,96
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.000.000,00	4.800.000,00	96
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	134.847.000,00	126.600.000,00	93,88
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73
01.2.07.10.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73
01.2.07.10.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

01.2.07.10.5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	74.847.000,00	73.900.000,00	98,73
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.07.10.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.07.10.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.07.10.5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00	52.700.000,00	87,83
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.307.120,00	222.741.617,00	72,72
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.280.000,00	6.280.000,00	100
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.987.120,00	50.417.617,00	55,41
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.426.880,00	2.967.200,00	35,21
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	64.560.240,00	34.447.817,00	53,36
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	13.002.600,00	72,24
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.040.000,00	166.044.000,00	79,43
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	209.040.000,00	166.044.000,00	79,43
01.2.08.04.5.1.01	Belanja Pegawai	149.640.000,00	133.044.000,00	88,91
01.2.08.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	149.640.000,00	133.044.000,00	88,91
01.2.08.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	132.120.000,00	121.164.000,00	91,71
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	123.960.000,00	114.636.000,00	92,48
01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	6.528.000,00	80
01.2.08.04.5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	17.520.000,00	11.880.000,00	67,81
01.2.08.04.5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.520.000,00	11.880.000,00	67,81
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	33.000.000,00	55,56
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	59.400.000,00	33.000.000,00	55,56
01.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00	33.000.000,00	55,56
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	55.800.000,00	33.000.000,00	59,14
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	3.600.000,00	0	0
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.390.200,00	128.820.214,00	81,3
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.01.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.325.000,00	4.436.300,00	83,31
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.965.200,00	95.073.914,00	84,91
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.500.000,00	33.025.000,00	98,58

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.465.200,00	62.048.914,00	79,08
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.760.000,00	17.080.000,00	96,17
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.600.000,00	8.970.000,00	93,44
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.160.000,00	8.110.000,00	99,39
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
01.2.09.10.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	23.340.000,00	12.230.000,00	52,4
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	59.401.000,00	43.911.316,00	73,92
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	59.401.000,00	43.911.316,00	73,92
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	27.600.000,00	19.147.732,00	69,38
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	19.147.732,00	69,38
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	19.147.732,00	69,38
02.2.02.01.5.1.02.01	Belanja Barang	2.600.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000,00	0	0
02.2.02.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	19.147.732,00	76,59
02.2.02.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.000.000,00	19.147.732,00	76,59
02.2.02.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000,00	19.147.732,00	76,59
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	31.801.000,00	24.763.584,00	77,87
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.801.000,00	24.763.584,00	77,87
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.801.000,00	24.763.584,00	77,87
02.2.02.02.5.1.02.01	Belanja Barang	2.181.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.181.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	702.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.479.000,00	0	0
02.2.02.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.620.000,00	24.763.584,00	83,6
02.2.02.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.620.000,00	24.763.584,00	83,6
02.2.02.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.620.000,00	24.763.584,00	83,6
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	67.542.000,00	51.908.834,00	76,85
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.542.000,00	51.908.834,00	76,9
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	36.422.000,00	30.810.116,00	84,59
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.422.000,00	30.810.116,00	84,59
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.422.000,00	30.810.116,00	84,59
03.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	1.800.000,00	0	0
03.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	0	0
03.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0	0
03.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	13.800.000,00	11.100.000,00	80,43
03.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	11.100.000,00	80,43
03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000,00	11.100.000,00	80,43
03.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.822.000,00	19.710.116,00	94,66
03.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.822.000,00	19.710.116,00	94,66

03.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.822.000,00	19.710.116,00	94,66
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.120.000,00	21.098.718,00	67,8
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	163.415.200,00	152.624.535,00	93,4
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	163.415.200,00	152.624.535,00	93,4
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.968.000,00	79.569.569,00	91,49
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.300.000,00	8.950.000,00	96,24
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	46.187.200,00	44.995.158,00	97,42
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	46.187.200,00	44.995.158,00	97,42
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.187.200,00	44.995.158,00	97,42
04.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	30.352.200,00	29.683.500,00	97,8
04.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.352.200,00	29.683.500,00	97,8
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.102.000,00	1.950.000,00	92,77
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.205.200,00	6.922.500,00	96,06
04.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.045.000,00	20.811.000,00	98,89
04.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.835.000,00	15.311.658,00	96,7
04.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.835.000,00	15.311.658,00	96,7
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.710.000,00	15.311.658,00	97,46
04.2.01.03.5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	125.000,00	0	0
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20.960.000,00	19.109.808,00	91,17
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.960.000,00	19.109.808,00	91,17
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.960.000,00	19.109.808,00	91,17
04.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	900.000,00	0	0
04.2.01.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0	0
04.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	0	0
04.2.01.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.060.000,00	19.109.808,00	95,26
04.2.01.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.060.000,00	19.109.808,00	95,26
04.2.01.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.060.000,00	19.109.808,00	95,26
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	511.300.000,00	380.746.450,00	74,47
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	511.300.000,00	380.746.450,00	74,5
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	435.700.000,00	343.796.600,00	78,91
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	435.700.000,00	343.796.600,00	78,91

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.700.000,00	343.796.600,00	78,91
05.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	30.538.000,00	20.472.400,00	67,04
05.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.538.000,00	20.472.400,00	67,04
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.938.000,00	10.472.400,00	95,74
05.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.600.000,00	10.000.000,00	51,02
05.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	300.950.000,00	278.325.000,00	92,48
05.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	30.900.000,00	86,55
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.200.000,00	8.400.000,00	63,64
05.2.01.02.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	22.500.000,00	22.500.000,00	100
05.2.01.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	265.250.000,00	247.425.000,00	93,28
05.2.01.02.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	265.250.000,00	247.425.000,00	93,28
05.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.212.000,00	44.999.200,00	43,18
05.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.212.000,00	44.999.200,00	43,18
05.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.212.000,00	44.999.200,00	43,18
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	75.600.000,00	36.949.850,00	48,88
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	75.600.000,00	36.949.850,00	48,88
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	36.949.850,00	48,88
05.2.01.03.5.1.02.01	Belanja Barang	13.475.000,00	12.459.850,00	92,47
05.2.01.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.475.000,00	12.459.850,00	92,47
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.675.000,00	3.384.850,00	92,1
05.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.075.000,00	92,6
05.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	62.125.000,00	24.490.000,00	39,42
05.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.125.000,00	24.490.000,00	39,42
05.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.125.000,00	24.490.000,00	39,42
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.698.000,00	7.829.800,00	80,74
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.698.000,00	7.829.800,00	80,7
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.698.000,00	7.829.800,00	80,74
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.698.000,00	7.829.800,00	80,74
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.698.000,00	7.829.800,00	80,74
06.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	5.503.000,00	5.387.000,00	97,89
06.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.503.000,00	5.387.000,00	97,89
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	537.000,00	463.000,00	86,22
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	616.000,00	598.000,00	97,08
06.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00	4.326.000,00	99,45
06.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.300.000,00	0	0
06.2.01.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	0	0
06.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.300.000,00	0	0
06.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.895.000,00	2.442.800,00	84,38
06.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.895.000,00	2.442.800,00	84,38
06.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.895.000,00	2.442.800,00	84,38
PAD 2023		856.000.000,00	22.703.000,00	2,65
BELANJA PEGAWAI		2.682.581.999,00	2.643.724.132,00	98,55
BELANJA BARANG DAN JASA		1.782.441.752,00	1.411.254.612,00	79,18
BELANJA MODAL		134.847.000,00	126.600.000,00	93,88
BELANJA DAERAH OPD DPMPSTP TA.2023		4.599.870.751,00	4.181.578.744,00	90,91

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 diperoleh hasil capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang sebesar 90.91%. Dengan capaian kinerja sebesar 90.91%. tersebut DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dapat dikategorikan sebagai instansi yang cukup berhasil dalam pencapaian kerjanya.

Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran belanja modal dan Belanja Operasional Sebesar Rp. 5.072.219.676,- terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan diharapkan Pencapaian Kinerja keberhasilan mencapai 100 % atau minimal sama dengan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Validitas data dan informasi belum maksimal;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
3. Belum optimalnya koordinasi internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang maupun dengan Dinas dan Instansi terkait;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang membantu Bupati Bengkayang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, ada 36 Jenis perijinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Bengkayang, dari jumlah perizinan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang boleh ditarik hanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dengan realisasi sebagai berikut :

JENIS LAIN	Restribusi Tahun 2017 (Rp.)	Restribusi Tahun 2018 (Rp.)	Restribusi Tahun 2019 (Rp.)	Restribusi Tahun 2020 (Rp.)	Restribusi Tahun 2021 (Rp.)	Restribusi Tahun 2022 (Rp.)	Restribusi Tahun 2023 (Rp.)	PENINGKATAN/ PENURUNAN %
IMB/PBG	1.749.655.800	255.823.506	814.464.467	751.272.164	298.341.172,50	321.893.200	22.703.000	107,89
UUG	124.881.874,35	8.837.600	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1.874.537.674,35	264.361.106	814.464.467	751.272.164	298.341.172,50	321.893.200	22.703.000	107,89

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, dan atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang proses pelayanan perizinan dimulai dari penerimaan berkas sampai dengan penyerahan SK izin kepada pemohon harus sesuai dengan standar waktu seperti yang telah ditentukan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN (HARI KERJA)	RATA RATA PENYELESAIAN (HARI KERJA)	TINGKAT KESESUAIAN %
Perizinan				
1.	Izin Gangguan	0	0	0
2.	Izin Layak Hygine Sanitasi	5	5	100
3.	Izin Pengelolaan Limbah Cair	5	5	100
4.	Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ke Tanah	5	5	100
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	5	5	100
6.	Izin Pengumpulan Limbah B3	5	5	100
7.	Izin Lingkungan	5	5	100
8.	Izin Daur Ulang / Pengolahan Sampah	7	7	100
9.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	5	100
10.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	5	5	100
11.	Izin Mendirikan Bangunan	7	7	100
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	5	5	100
13.	Izin Lalu Lintas Angkutan Jalan	5	5	100
14.	Izin Pelayaran	5	5	100

15.	Izin Pendirian Rumah / Klinik Bersalin	5	5	100
16.	Izin Balai Pengobatan	5	5	100
17.	Izin Pendirian Rumah Sakit	5	5	100
18.	Izin Pendirian Puskusmas	5	5	100
19.	Izin Apotik	5	5	100
20.	Izin Optik	5	5	100
21.	Izin Pengobatan Tradisional	5	5	100
22.	Izin Praktek Fisioterapi	3	3	100
23.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	5	5	100
24.	Izin Toko Obat	5	5	100
25.	Izin Tukang Gigi	5	5	100
26.	Izin Praktek Dokter	5	5	100
27.	Izin Praktek Dokter Gigi	5	5	100
28.	Izin Praktek Dokter Spesialis	5	5	100
29.	Izin Praktek Bidan	5	5	100
30.	Izin Kerja Bidan	5	5	100
31.	Izin Praktek Perawat	5	5	100
32.	Izin Kerja Perawat	5	5	100
33.	Izin Praktek Perawat Gigi	5	5	100
34.	Izin Praktek Apoteker	5	5	100
35.	Izin Praktek Tenaga Teknis Kesehatan	5	5	100
36.	Izin Kerja Apoteker	5	5	100
37.	Izin Praktek Asisten Apoteker	5	5	100
38.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5	5	100
39.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol	5	5	100
40.	Izin Usaha Toko Modern	5	5	100
41.	Izin Pengelolaan Pasar Tradisional	5	5	100
42.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	5	5	100

43.	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	5	5	100
44.	Izin Usaha Penggilingan Padi (Huler)	5	5	100
45.	Izin Kios Sarana Produksi	5	5	100
46.	Izin Usaha Industri	7	7	100
47.	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	3	3	100
48.	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan	3	3	100
49.	Izin Usaha Hotel dan Penginapan	3	3	100
50.	Izin Usaha Kepariwisataaan	3	3	100
51.	Izin Usaha Perjalanan Wisata	3	3	100
52.	Izin Prinsip Penanaman Modal	7	7	100
53.	Izin Usaha Penanaman Modal	3	3	100
54.	Izin Lokasi	14	14	100
55.	Izin Perpanjangan Lokasi	5	5	100
56.	Izin Usaha Perkebunan	7	7	100
57.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	7	7	100
58.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	7	7	100
59.	Izin Perubahan Luas Lahan	7	7	100
60.	Izin Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan Pengurangan	7	7	100
61.	Izin Jenis Tanaman	5	5	100
62.	Izin Diversifikasi Usaha	5	5	100
63.	Izin Usaha Pertanian	5	5	100
64.	Izin Usaha Produktifitas Benih	5	5	100
65.	Izin Produksi Bibit Ternak	5	5	100
66.	Izin Usaha Pakan Ternak	5	5	100
67.	Izin Fasilitas Rumah Hewan	5	5	100
68.	Izin Rumah Sakit Hewan	7	7	100
69.	Izin Rumah Potong Hewan	7	7	100
70.	Izin Usaha Pengedar Obat Hewan	5	5	100
71.	Izin Praktek Dokter Hewan	5	5	100
72.	Izin Pengolahan Ikan	7	7	100
73.	Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan	7	7	100
74.	Izin Pembudidayaan Ikan	7	7	100
75.	Izin Kapal Pengangkutan Ikan	7	7	100
76.	Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas	7	7	100
77.	Izin Panas Bumi	7	7	100

78.	Izin Sektor Ketanagalistrikan (PU)	7	7	100
79.	Izin Minyak dan Gas Bumi	7	7	100
80.	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	5	5	100
81.	Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	5	5	100
82.	Izin Penempatan / Penyaluran Tenaga Kerja Swasta	5	5	100
Non Perizinan				
1.	Informasi Lahan	5	5	100
2.	Rekomendasi Hak guna Usaha (HGU)	7	7	100
3.	Izin Survey	3	3	100
4.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	5	5	100
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	3	100
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	100
7.	Tanda Daftar Industri (TDI)	3	3	100
8.	Izin Reklame / Iklan	5	5	100
9.	Tanda Daftar Usaha Peternakan	3	3	100
10.	Tanda Daftar Budi Daya Perkebunan	3	3	100
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3	3	100
12.	Surat Tanda Daftar Waralaba	3	3	100
13.	Rekmendasi Penerbitan PKAPT Perdagangan Kayu atau Pulau	5	5	100
14.	Rekomendasi Pembangunan SPBU	5	5	100
15.	Sertifikat Laik Bangunan Gedung	5	5	100
16.	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	3	3	100
17.	Izin Pendidikan Formal Non Formal	5	5	100
18.	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	3	3	100
19.	Tanda Daftar Penempatan / Penyalur Tenaga Kerja Swasta	3	3	100
20.	Izin Penelitian /Research	3	3	100
21.	Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	3	3	100
22.	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	3	100

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia ;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal.
4. Kondisi saat ini tahun 2023 masih dalam penyusunan regulasi yang selanjutnya UIN Mandiri dan Bangunan berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga perlu menyesuaikan regulasi yang baru.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana maka perlu ada alur kerja yang jelas dan terprogram yang dilaksanakan, Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah *Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dan Misi 3 (Ketiga) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.* Ini merupakan acuan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dalam merumuskan **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** sesuai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan yang akan mendukung **Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati.**

untuk *Misi Kedua dan Misi Ketiga* tersebut. Program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi Kedua dan Misi Ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang merupakan **Perencanaan Strategik**, diantaranya:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
5. PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan. Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah "Menerapkan Pelayanan Publik, Sistem Informasi Terpadu dan Penjamin Mutu Yang Berkualitas dan Efisien " dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan adalah "Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pengembangan industri perdagangan, investasi serta kemitraan antar pelaku ekonomi dalam situasi yang kondusif".

Berdasarkan pernyataan tujuan diatas serta pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bengkayang untuk waktu 1 – 5 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Publik yang Mudah, Murah, Cepat Dan Tepat Serta Transparan.
2. Terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif dan dapat menarik minat investor;
3. Menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintah daerah.

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Kerja yang akan dicapai secara nyata

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Dari tujuan diatas maka sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan mekanisme perijinan dengan sistem pelayanan yang prima. Indikator sasaran ini yaitu 100% kesesuaian waktu rata-rata pemrosesan penerbitan izin dengan ketentuan (dengan catatan berkas perijinan yang masuk telah lengkap persyaratannya).
2. Meningkatkan sosialisasi tentang investasi di Kabupaten Bengkayang. Adapun indikator tercapai sasaran tersebut yaitu adanya peningkatan Nilai Investasi PMA DAN PMDN.
3. terselesaikannya kasus dan sengketa antar investor dan antara investor dengan masyarakat. Adapun indikatornya jumlah kasus dan sengketa yang terselesaikan.

Berdasarkan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah ditetapkan dalam strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Visi RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 yaitu; ” **KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIR, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA**”. Dengan tujuan bahwa Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, system yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Untuk mengimplementasikan pelayanan prima tersebut, harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang berpihak kepada pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bengkayang.

Adapun kebijakan dapat diartikan sebagai ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi instansi Pemerintah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat, Kebijakan (umum) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Bengkayang yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan prosedur perijinan yang memudahkan pelayanan publik.
2. Mengembangkan prosedur perizinan penanaman modal dan pembinaan investasi yang memudahkan investor/perusahaan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasarannya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsinya, maka program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Program Utama

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 1. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2. **Program Promosi Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 3. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 3. Pengawasan Penanaman Modal
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Evaluasi Kinerja serta akuntabilitas keuangan dan pencapaian kinerja organisasi.

2. Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Gaji dan tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan sumber daya aparatur yang handal dan pencapaian kinerja organisasi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan Kebutuhan sarana dan prasarana Kantor.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pengadaan Barang serta meningkatkan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana Kantor.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Jasa Operasional Kantor diantaranya air, listrik dan internet

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, peralatan jasa Kendaraan Dinas Operasional serta jasa pemeliharaan peralatan lainnya.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir):

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 bersumber dari DAU.

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD nya.

Sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir)

BAB V PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 agar lebih terfokus sesuai dengan program prioritas.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (RENJA) Bengkayang Tahun 2025, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli muda serta Pejabat Pengawas beserta staf yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

- (2) Seluruh Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang agar melaksanakan program-program Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
- (3) Setiap Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang agar mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.
- (4) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 merupakan dasar penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
- (5) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran PD (RKA-PD);
- (6) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja (RENJA) memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran serta program, kegiatan dan sug kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Bengkayang, Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. BENGKAYANG



PAULUS SH., M.Kn

Pembina Tk. I

NIP. 19740718 200212 1 004

MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Unit Organisasi : 2.18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															17
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN						5.827.695.081,00							8.054.657.772,00		
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN						5.827.695.081,00							8.054.657.772,00		
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhiya Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	93,56%	95%	100 %	4.637.195.081,00						100 %	6.268.964.822,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	59,80%	95%	100 %	68.275.000,00					DPMPPTSP Kab Bengkulu	100 %	71.643.094,00	DPMPPTSP	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	69,44%	75%	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	2 Dokumen	38.368.094,00	DPMPPTSP	
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	92,77%	95%	2 Dokumen	6.655.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	2 Dokumen	6.655.000,00	DPMPPTSP	
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0%	100%	1 Dokumen	6.655.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	1 Dokumen	6.655.000,00	DPMPPTSP	
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	38,85%	100%	1 Dokumen	6.655.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	1 Dokumen	6.655.000,00	DPMPPTSP	
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	46,69%	100%	1 Dokumen	6.655.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	1 Dokumen	6.655.000,00	DPMPPTSP	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJAH AKHIR PERIODE RENJANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKAWA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	46,60%	100%	1 Laporan	6.655.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM			DPMPTSP Kab. Bengkulu	1 Laporan	6.655.000,00	DPMPTSP
2	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan OPD	100 %	90,20%	100%	100 %	3.596.599.368,00					DPMPTSP Kab. Bengkulu	100 %	4.697.248.904,00	DPMPTSP
3	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	99,12%	100%	34 Orang/bulan	3.277.522.088,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI			DPMPTSP Kab. Bengkulu	34 Orang/bulan	4.033.026.505,60	DPMPTSP
4	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	94,16%	100%	10 Dokumen	253.927.280,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI			DPMPTSP Kab. Bengkulu	10 Dokumen	457.369.054,00	DPMPTSP
5	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Laporan	86,14%	100%	1 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI			DPMPTSP Kab. Bengkulu	1 Dokumen	11.800.000,00	DPMPTSP
6	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	89,42%	100%	1 Laporan	11.500.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI			DPMPTSP Kab. Bengkulu	1 Laporan	11.800.000,00	DPMPTSP
7	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0%	100%	1 Dokumen	6.650.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI			DPMPTSP Kab. Bengkulu	1 Dokumen	7.980.000,00	DPMPTSP
8	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	30,17%	100%	2 Laporan	35.500.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM			DPMPTSP Kab. Bengkulu	2 Laporan	81.364.034,40	DPMPTSP
9	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Seluruh Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan	100 %	6,14%	75%	100 %	50.000.000,00					DPMPTSP Kab. Bengkulu	100 %	55.214.723,00	DPMPTSP
10	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	6,14%	75%	7 Orang	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI			DPMPTSP Kab. Bengkulu	7 Orang	55.214.723,00	DPMPTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAMUKA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEBANGKIT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Seluruh Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Kantor	100 %	83,92%	100%	100 %	334.500.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	12	13	DPNPTSP Kab Bengkulu	15	610.681.234,00	17
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	97,95%	100%	100 %	17.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	10 Paket	75.000.000,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	97,33%	100%	100 %	50.500.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	44 Paket	81.000.000,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	96,67%	100%	100 %	60.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	205 Paket	94.000.000,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	95%	86,69%	95%	65000 Paket	45.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	65000 Paket	85.000.000,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	70%	44,53%	70%	5 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	5 Dokumen	75.587.254,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90%	80,36%	90%	24 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	24 Laporan	200.000.000,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Sarana Prasarana untuk Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Kantor	100 %	93,96%	100%	100 %	252.000.000,00					DPNPTSP Kab Bengkulu	100 %	150.770.480,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	93,96%	100%	10 Unit	120.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	10 Unit	70.710.480,00	DPNPTSP
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	87,83%	100%	12 Bulan Unit	132.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPNPTSP Kab Bengkulu	12 Bulan Unit	81.000.000,00	DPNPTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023				CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PEMBANGKIT DAERAH PEMANGKOTING JARAS
						1	2	3	4	TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Seluruh Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Kantor	100%	72,72%	5	6	7	8	100 %	190.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	100%	571.453.887,50	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	100%					350 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	350	106.453.887,50	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,42%					12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	12 Laporan	86.500.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	79,43%					22 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	22 Laporan	250.000.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Urusan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kantor	100 %	81,30%					100 %	145.820.713,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	100 %	195.823.298,50	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	83,31%					12 Unit	10.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	12 Unit	12.400.000,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	12 Unit	84,91%					12 Unit	85.820.713,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	12 Unit	114.998.755,42	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	96,17%					10 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	10 Unit	33.123.342,58	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	52,40%					3 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI		DPMPTSP Kab. Bengkulu	3 Unit	33.500.000,00	DPMPTSP
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		4 Bahan	73,92%					3 Bahan	425.000.000,00					4 Bahan	637.796.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	
1	2	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Dokumen Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Dokumen Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMMDN) dengan UMKM di Daerah	3 Dokumen	73,92%	80,00%	3 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	3 Dokumen	375.290.950,00	DPMPPTSP
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	69,98%	75,00%	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	2 Dokumen	300.000.000,00	DPMPPTSP
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	69,98%	72,00%	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	5 Dokumen	75.290.950,00	DPMPPTSP
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RUPM	3 Dokumen	73,92%	75,00%	3 Dokumen	175.000.000,00					DPMPPTSP Kab Bengkulu	3 Dokumen	262.500.000,00	DPMPPTSP
		2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah	77,87%	80,00%	2 Daerah	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	2 Daerah	75.000.000,00	DPMPPTSP
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70%	75,00%	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	1 Dokumen	187.500.000,00	DPMPPTSP
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00 %	93,40%	100%	85,00 %	450.000.000,00							85,00 %	678.650.000,00	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Meningkatnya penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan PM berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha	85,00 %	93,40%	100%	85,00 %	450.000.000,00					DPMPPTSP Kab Bengkulu	85,00 %	678.650.000,00	DPMPPTSP
		2.18.04.2.01.0005	Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	91,17%	95,00%	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab Bengkulu	2 Dokumen	38.750.000,00	DPMPPTSP
		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PEBAHANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	91,40%	95,00%	700 Pelaku Usaha	315.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			DPMPPTSP Kab. Bengkulu	700 Pelaku Usaha	472.500.000,00	DPMPPTSP
2	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Orang	97,42%	100%	400 Orang	60.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			DPMPPTSP Kab. Bengkulu	400 Orang	90.400.000,00	DPMPPTSP
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2 Kegiatan Usaha	96,24%	100%	2 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			DPMPPTSP Kab. Bengkulu	2 Kegiatan Usaha	75.000.000,00	DPMPPTSP
4.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PINANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	80 %	76,85%	80,00%	80 %	110.000.000,00					DPMPPTSP Kab. Bengkulu	80 %	165.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Pinanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sasaran, Program & Kegiatan RPKD yang konsisten dengan RPJMD & Renstra PD	80 %	76,90%	80,00%	80 %	110.000.000,00					DPMPPTSP Kab. Bengkulu	80 %	165.000.000,00	DPMPPTSP
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Pinanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Pinanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67,80%	75,00%	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab. Bengkulu	1 Dokumen	90.000.000,00	DPMPPTSP
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Pinanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Pinanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	84,59%	85,10%	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI			DPMPPTSP Kab. Bengkulu	1 Dokumen	75.000.000,00	DPMPPTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PINANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yg melakukan LKPM	85,53%	74,47%	85,50%	85,53%	155.500.000,00						85,53%	233.250.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Pinanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelaku usaha yang menyampalakan LKPM secara tepat waktu dan akurat	85,53 %	74,50%	85,50%	85,53 %	155.500.000,00					DPMPPTSP Kab. Bengkulu dan Pelaku Usaha	85,53 %	233.250.000,00	DPMPPTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	78,91%	80,10%	5 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			DPMPPTSP Kab Bengkulu dan Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	75.000.000,00	DPMPPTSP			
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	78,91%	80,10%	150 Pelaku Usaha	65.500.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			DPMPPTSP Kab Bengkulu dan Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	98.250.000,00	DPMPPTSP			
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terintegrasi pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan Usaha	48,88%	70%	10 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			DPMPPTSP Kab Bengkulu dan Pelaku Usaha	10 Kegiatan Usaha	60.000.000,00	DPMPPTSP			
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota	80,50%	80,74%	85%	80,50%	50.000.000,00						80,50%	75.000.000,00				
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Ketersediaan bahan evaluasi data dan Informasi terhadap pelaksanaan penanaman modal	80,50 %	80,74%	85%	80,50 %	50.000.000,00					DPMPPTSP Kab Bengkulu	80,50 %	75.000.000,00	DPMPPTSP			
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	80,74%	85%	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			DPMPPTSP Kab Bengkulu	4 Dokumen	75.000.000,00	DPMPPTSP			
								5.827.695.081,00	J U M L A H									8.058.687.772,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BENGKAYANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	12	13	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK PENGANGGARAN DENGAN PELAYANAN TERPADU PILAS						5.827.695.081,00							88.481.250,00	
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.827.695.081,00							88.481.250,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						4.637.195.081,00							8.000	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersebutnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Desentralisasi	-			100 %	68.275.000,00							0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				35.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen				6.655.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				6.655.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				6.655.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				6.655.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				6.655.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	6	7	8 1 Laporan	9 6.655.000,00	10 Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 -	13 -	14 -	15 15	16 0,00	17 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi keuangan OPD	-			100 %	3.596.599.398,00			-	Memperkuat transformasi pelayanan publik PDI. Meningkatkan kualitas layanan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan	DPMPPTSP	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	3.277.522.086,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik PDI. Meningkatkan kualitas layanan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan	DPMPPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	253.927.280,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PDI. Meningkatkan kualitas layanan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan	DPMPPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				1 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
																12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11.500.000,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan															
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemertiksaan dan Tindak Lanjut Pemertiksaan				1 Dokumen	6.650.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	35.500.000,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tempuhnya Seluruh Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Kantor	-			100 %	50.000.000,00			-	-	DPMTSP	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	50.000.000,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	334.500.000,00			-	-	DPMTSP	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	17.000.000,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	50.500.000,00	Kab. Bengayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANONR PERIODE REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI TAMUN 2023	PILGARAN CAPAIAN TAMUN 2023	CAPAIAN KEMAJUAN DAN KEMAMPUAN PENGEMBANGAN							KELOMPOK Sasaran	PENGUKURAN HASIL KEMAJUAN		PENGUKURAN HASIL KEMAMPUAN
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROGRES		TARGET 2023		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				205 Paket	60.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	205 PAKET	60.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.06.0005			Pengadaan Bawang Cabutan dan Pengemasan				65000 Paket	45.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	65000 PAKET	45.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.06.0006			Pengadaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan				5 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	5 PAKET	12.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.06.0008			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD				24 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	24 PAKET	150.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.07			Pengadaan Bawang Merah Distribusi Penyediaan Pemerintah Daerah				100 %	250.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	100 PAKET	250.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10 Unit	120.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	10 PAKET	120.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bulan Unit	132.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 PAKET	132.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.08			Pengadaan Jasa Penunjang Unit dan Penerimaan				-	180.000.000,00	Kab. Bangkayang Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 PAKET	180.000.000,00	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	
2.18.01.2.08.0001			Pengadaan Jasa Surti Menyortir				-	-	-	-	-	-	12 PAKET	-	0,00	205 PAKET Kecamatan, Dana Pelanggaran Ternakol Satu Penerima	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Saraf Menyusul				350 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusi				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dissediaan				22 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kantor	-			100 %	145.820.713,00			-	-	DPMTSP	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	10.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perchten Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perchtuannya				12 Unit	85.820.713,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.06.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.06.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersusunnya bahan kajian potensi PM yang dipromosikan	3 bahan			3 bahan	425.000.000,00						3 bahan	88.481.200,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA TAHUN 2023 OPD	PRAKRAJAAN CAPAIAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	PD4. Mempertahankan kualitas pelayanan publik melalui tren informal digital	DPMPPTSP	-	88.481.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD4. Mempertahankan kualitas pelayanan publik melalui tren informal digital	DPMPPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0003		Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD1. Meningkatkan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing berbasis SDA Unggulan	DPMPPTSP		88.481.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RUPM	-			3 Dokumen	175.000.000,00			-	-	DPMPPTSP	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0003		Pemutakhiran data potensi Investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi Investasi				2 Daerah	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	80 %			80 %	110.000.000,00						80 %	0,00	
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi lokal tentang potensi investasi penanaman modal daerah	-			80 %	110.000.000,00			-	-	DPMPPTSP	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKSTRAT OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKTEK CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKTEK MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Banglayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kawasan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Banglayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5 %			85,5 %	450.000.000,00						85,5 %	0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan PM berbasis sistem pelayanan perizinan bisnis yang terintegrasi secara elektronik	-			85,50 %	450.000.000,00			-	-	DPMPTSP	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan Pemberian Fasilitas/Instansi Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan Pembentukan Fasilitas/Instansi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Banglayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha			700 Pelaku Usaha	315.000.000,00	Kab. Banglayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengalihan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha			400 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kab. Banglayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2 Kegiatan Usaha			2 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Banglayang, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]